

## **BAB II**

### **LANDASAN TEORI**

#### **A. Efektivitas**

##### **1. Pengertian**

Efektivitas, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah daya guna, hasil guna, dan sebagainya. Efektivitas merupakan suatu prosedur atau tindakan yang berusaha untuk memberikan hasil yang terbaik dan sesuai dengan hasil yang ditargetkan dikatakan efektif. Keberhasilan atau kegagalan dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan dapat digunakan untuk menentukan apakah proses atau tindakan tersebut efektif atau tidak. Efektivitas juga dapat diartikan sebagai sesuatu yang mempengaruhi bagaimana sebuah rencana kegiatan dilaksanakan, yang akan memastikan bahwa upaya yang dilakukan berhasil.<sup>1</sup>

Menurut Mardiasmo, Efektivitas didefinisikan sebagai ukuran kinerja organisasi dalam mencapai tujuannya.<sup>2</sup> Menurut pandangan ini, sebuah organisasi dianggap berhasil jika tujuan yang telah ditetapkan telah tercapai. Efektivitas menjadi pengukur apakah tujuan organisasi tercapai atau tidak.

Menurut Harbani Pasolog, efektivitas berasal dari istilah "efek" dan merupakan sebuah hubungan yang disebabkan oleh sebab dan akibat. Efektivitas dapat dilihat sebagai fungsi dari faktor-faktor lain. Sebuah

---

<sup>1</sup> Moh. Yusri Abadi, Dian Saputra Marzuki, dkk, *Efektivitas Kepatuhan terhadap Protokol Kesehatan Covid-19 pada Sektor Informal di Kota Makassar*, cetakan pertama (Uwais Inspirasi Indonesia, 2021), hlm 1.

<sup>2</sup> Mardiasmo, *Akuntansi Sektor Publik* (Yogyakarta : ANDI, 2018), hlm 134.

tujuan yang telah ditetapkan dan dapat dicapai sesuai jadwal karena adanya prosedur tertentu dikatakan efektif.<sup>3</sup>

Efektivitas merupakan salah satu faktor utama yang menentukan apakah sebuah organisasi akan berhasil atau gagal dalam menjalankan rencana atau operasi dengan maksud untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Efektivitas suatu program harus dinilai untuk memastikan profitabilitas dan tingkat efektivitasnya. Efektivitas adalah istilah yang digunakan untuk menggambarkan pencapaian tujuan yang telah ditentukan. Sangatlah penting untuk mempertimbangkan efektivitas program ketika memutuskan apakah program tersebut akan dilanjutkan atau tidak.

## 2. Pendekatan Efektivitas

Efektivitas terdiri dari tiga pendekatan yaitu sebagai berikut :

### 1. Pendekatan sumber (*recourse approach*)

Tujuan dari pendekatan Sumber adalah untuk mengukur seberapa efektif. Pendekatan ini menempatkan prioritas yang lebih tinggi pada kemampuan organisasi untuk berhasil memperoleh sumber daya non-fisik dan fisik yang diperlukan untuk memenuhi kebutuhan organisasi.

### 2. Pendekatan proses (*process approach*)

Pendekatan proses mengkaji seberapa baik semua mekanisme atau proses internal organisasi diimplementasikan sebagai bagian dari sebuah program.

---

<sup>3</sup> Mulkan Syah Riza, *Analisis Efektivitas Distribusi Zakat Produktif dalam Meningkatkan Kesejahteraan Mustahik (Studi Kantor Cabang Rumah Zakat Sumatera Utara)*, AT-TAWASSUTH: Jurnal Ekonomi Islam 4, no. 1 (14 Februari 2019): 137, <https://doi.org/10.30821/ajei.v4i1.4090>.

### 3. Pendekatan sasaran (*goals approach*)

Pendekatan sasaran memberikan penekanan yang kuat pada output dan mengevaluasi kemampuan organisasi untuk menghasilkan hasil yang sesuai dengan strategi. Menurut Streers, karena efektivitas merupakan konsep yang abstrak, maka efektivitas tidak boleh dipandang sebagai produk jadi, melainkan sebagai proses yang berkelanjutan. Penting juga untuk menyadari bahwa komponen-komponen yang berbeda dari sebuah program saling bergantung dan berkontribusi terhadap kemungkinan keberhasilan program secara keseluruhan.

### 3. Ukuran Efektivitas Program

Efektivitas program mengukur seberapa baik pelaksanaan kegiatan dalam suatu program berkontribusi terhadap pencapaian tujuan awalnya. Keberhasilan suatu program dapat dinilai berdasarkan sejauh mana tujuan yang telah direncanakan oleh organisasi tercapai secara efektif.

Efektivitas program dapat dinilai dengan membandingkan output yang dihasilkan dengan tujuan yang telah ditetapkan. Selain itu, pendapat dari anggota program juga bisa menjadi indikator efektivitas. Menurut Budiani dalam bukunya "Efektivitas Program," beberapa variabel berikut ini dapat digunakan untuk mengukur aspek-aspek yang mempengaruhi efektivitas suatu program :

#### 1. Ketepatan Sasaran Program

Budiani menjelaskan bahwa tingkat ketepatan peserta program sesuai dengan target yang telah ditentukan menentukan ketepatan

target program yang direncanakan. Atau, dapat juga digunakan untuk menyatakan sejauh mana pelaksanaan suatu program sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan.

## 2. Sosialisasi Program

Sosialisasi merupakan proses memperkenalkan kelompok baru pada komunikasi yang berhubungan dengan budaya. Sosialisasi adalah proses di mana penyelenggara program membagikan rincian tentang acara atau program yang dijadwalkan kepada publik yang lebih luas, terutama audiens yang dituju atau calon peserta. Berdasarkan hal tersebut, memungkinkan mereka untuk memberikan informasi tentang pelaksanaan program.<sup>4</sup>

Sosialisasi ini diperlukan agar masyarakat luas dapat memahami secara utuh program atau kegiatan yang akan dilaksanakan, termasuk bagaimana pelaksanaannya, apa saja manfaatnya, dan bagaimana cara kerjanya.

## 3. Keberhasilan Tujuan Program

Keberhasilan program merupakan sejauh mana hasil akhir sesuai dengan tujuan program yang telah ditetapkan akan menentukan keberhasilan tujuan tersebut. Menetapkan tujuan lebih awal akan memudahkan untuk merealisasikan dan mencapai hasil. Pelaksana program dibatasi konsentrasinya pada tujuan yang telah ditetapkan berdasarkan penetapan tujuan. Efektivitas suatu program atau

---

<sup>4</sup> Fajri Miftahuddin, *Efektivitas Program Promosi Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) Little Bandung dalam Meningkatkan Pemasaran Industri Kreatif Kota Bandung (Studi Kasus Little Bandung Store di Petaling Jaya – Malaysia)* (Skripsi: Universitas Komputer Indonesia), 2020.

kegiatan dapat dinilai dengan membandingkan antara tujuan dengan hasilnya.

#### 4. Pemantauan

Pemantauan adalah proses yang dilakukan untuk mengawasi peserta program setelah kegiatan atau program selesai. Aktivitas ini dilakukan sebagai bentuk perhatian dari pelaksana kepada peserta setelah program berakhir. Tujuan dari pemantauan adalah untuk memastikan bahwa peserta merasakan dampak positif yang berkelanjutan setelah mengikuti program.

Pemantauan sangat penting untuk mengidentifikasi masalah di kemudian hari ketika program-program diimplementasikan yang menyimpang dari jadwal yang direncanakan. Berdasarkan hal tersebut memungkinkan identifikasi kekurangan dan pengembangan solusi selanjutnya yang berkaitan dengan masalah ini.

Pemantauan merupakan suatu kegiatan pengumpulan informasi yang berkelanjutan untuk memberikan informasi kepada pengelola program dan pemangku kepentingan mengenai indikasi awal adanya kemajuan maupun kekurangan terhadap pelaksanaan program dalam rangka perbaikan untuk mencapai tujuan suatu program.<sup>5</sup>

---

<sup>5</sup> Serafin Wisni Septiarti Kiki Irafa Candra, dkk, *Pendampingan Masyarakat*, Cetakan Pertama (Madiun: CV. Bayfa Cendekia Indonesia, 2024), hlm 96.

## B. Kesejahteraan

### 1. Pengertian

Kemakmuran dan kualitas hidup yang dialami oleh individu, kelompok, atau masyarakat dapat dikategorikan sebagai kesejahteraan.<sup>6</sup> Kesejahteraan menurut KBBI, adalah kondisi sejahtera yang mencakup hal-hal seperti keselamatan, keamanan, dan ketentraman. Menurut BKKBN (Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional) sebuah keluarga yang memenuhi kebutuhannya dalam 12 aspek yaitu, agama, pangan, sandang, papan, kesehatan, pendidikan, keluarga berencana, tabungan, interaksi dalam keluarga dan masyarakat, informasi, dan peranan dalam masyarakat.<sup>7</sup>

Salah satu faktor yang sangat penting untuk mengurangi kemungkinan terjadinya kesenjangan sosial dan stabilitas ekonomi dan sosial dalam kehidupan bermasyarakat adalah kesejahteraan. Kebijakan ekonomi pemerintah yang mengatur perekonomian dalam upaya melestarikan nilai-nilai masyarakat dapat mempercepat pertumbuhan ekonomi lokal.<sup>8</sup>

Menurut Fahrudin, kata "catera" mengacu pada individu yang sejahtera yang bebas dari kemiskinan, kebodohan, ketakutan, atau kekhawatiran, yang berarti hidupnya aman dan tenteram lahir dan batin.<sup>9</sup>

---

<sup>6</sup> Markhamah Cita Raras Nindya, dkk, *Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat Berbasis Potensi Lokal*, Cetakan I (Surakarta: Muhammadiyah University Press, 2021), hlm 8.

<sup>7</sup> Tim Redaksi Kamus Bahasa Indonesia, *Kamus Bahasa Indonesia* (Jakarta: Pusat Bahasa Indonesia Departemen Pendidikan Nasional, 2008), hlm 1328

<sup>8</sup> Nur Zaman Muhammad Chaerul, dkk Syafrizal, *Sumber Daya dan Kesejahteraan Masyarakat* (Medan: Yayasan Kita Menulis, 2021), 30

<sup>9</sup> Dewi Sundari Tanjung, *Pengaruh Zakat Produktif Baznas Kota Medan terhadap Pertumbuhan Usaha dan Kesejahteraan Mustahik di Kecamatan Medan Timur*, *AT-TAWASSUTH: Jurnal Ekonomi Islam* 4, no. 2 (9 Agustus 2019): 349, <https://doi.org/10.30829/ajei.v4i2.5555>.

Kesejahteraan berfungsi sebagai pengukur tingkat kekayaan, kedudukan ekonomi, kepuasan, dan standar hidup masyarakat.

Menurut Manan, bahwa kesejahteraan ekonomi dapat dicapai dengan meningkatkan pendapatan dari hasil penciptaan sesuatu yang bermanfaat dengan mengoptimalkan sumber daya manusia dan sumber daya alam. Kesejahteraan merupakan prinsip dasar dalam proses produksi. Namun menurut perspektif Islam, seseorang harus mempertimbangkan dampak dari hal-hal yang diproduksi, oleh karena itu memproduksi lebih banyak tidak memberikan kesejahteraan ekonomi.<sup>10</sup>

Selain kesejahteraan ekonomi, kesejahteraan sosial juga menjadi tolak ukur dari kedamaian kehidupan manusia. Menurut Islam Kesejahteraan adalah menyerahkan diri sepenuhnya kepada Allah, sebab jiwa tidak akan mungkin tenang jika individu terpecah. Kesejahteraan sosial misalnya, didasarkan pada gagasan bahwa ganjaran selalu mengikuti penilaian terbaik dari Allah setelah semua upaya yang mungkin dilakukan. Oleh karena itu, Allah meminta manusia untuk berusaha sekuat tenaga untuk tunduk kepada-Nya.<sup>11</sup>

## **2. Indikator Kesejahteraan**

1. Menurut Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN), indikator keluarga sejahtera diklasifikasikan ke dalam

---

<sup>10</sup> Eka Fatmawati M. Arif Musthofa, Daud, *Potensi dan Kontribusi UMKM Terhadap Kesejahteraan Masyarakat Dalam Perspektif Islam*, Cetakan Pertama (Zabags Qu Publish, 2022), hlm 20.

<sup>11</sup> Rohiman Notowidagdo, *Pengantar Kesejahteraan Sosial: Berwawasan Iman dan Takwa*, Cetakan Pertama (AMZAH, 2016), hlm 47.

lima tahap. Berikut ini adalah indikator-indikator tersebut : Keluarga Pra Sejahtera

Keluarga yang belum memenuhi salah satu kebutuhan dasarnya- seperti pangan, sandang, papan, kesehatan, dan pendidikan- dikategorikan sebagai keluarga pra-sejahtera. Ciri-ciri keluarga pra-sejahtera adalah sebagai berikut :

- a. Keluarga melaksanakan ibadah menurut agamanya dan kepercayaan masing-masing.
- b. Keluarga yang mampu makan dua kali atau lebih dalam sehari.
- c. Keluarga yang mampu menggunakan pakaian berbeda sesuai dengan keperluan dan kondisi.
- d. Keluarga yang memiliki rumah tidak berdasar tanah.
- e. Keluarga yang dapat memeriksakan status kesehatannya dengan memanfaatkan pelayanan kesehatan.

## 2. Keluarga Sejahtera I

Keluarga Sejahtera I merupakan keluarga yang sebagian dapat memenuhi kebutuhan dasarnya, namun tidak mampu memenuhi seluruh kebutuhan psikologisnya, termasuk yang berkaitan dengan pendidikan, keluarga berencana, interaksi dalam keluarga, dan interaksi dengan lingkungan sekitar. Berikut ini kriteria keluarga sejahtera I :

- a. Keluarga yang dapat melakukan ibadah secara teratur berdasarkan keyakinan dan kepercayaan masing-masing.



- b. Keluarga yang mampu makan lauk pauk seperti daging ikan sekurang-kurangnya sekali dalam seminggu. Keluarga yang mampu memperoleh pakaian baru dalam satu tahun terakhir.
- c. Seluruh anggota keluarga sehat dalam kurun waktu tiga bulan terakhir sehingga dalam melaksanakan peran dan fungsinya masing-masing dalam keluarga.
- d. Paling sedikit ada satu anggota keluarga yang mampu memberikan penghasilan.

### 3. Keluarga Sejahtera II

Keluarga Sejahtera II merupakan keluarga yang memiliki kemampuan untuk memebuhi kebutuhan perkembangan, seperti kebutuhan untuk menabung dan mendapatkan informasi. Berikut ini adalah indikator keluarga sejahtera II :

- a. Keluarga yang mampu meningkatkan pendidikan dan pengetahuan tentang agama.
- b. Keluarga yang mampu memiliki simpanan atau tabungan.
- c. Keluarga yang dapat makan bersama dengan anggota setidaknya sekali dalam sehari.
- d. Keluarga yang memiliki informasi media.

### 4. Keluarga Sejahtera III

Keluarga Sejahtera III yaitu keluarga yang mampu memenuhi semua kebutuhan dasar, kebutuhan psikologi dan kebutuhan perkembangan, tetapi tidak mampu memberikan kontribusi sosial. Seperti biasa, mereka dapat berperan aktif sebagai pengurus kemasyarakatan dan

memberikan kontribusi materiil dan finansial untuk kepentingan masyarakat. Kriteria keluarga sejahtera III sebagai berikut :

- a. Keluarga yang dapat memberikan sumbangan sosial secara teratur dan sukarela dalam bentuk materiil kepada lingkungan sosial.
- b. Keluarga yang aktif sebagai pengurus yayasan atau institusi masyarakat.

#### 5. Keluarga Sejahtera III Plus

Keluarga Sejahtera III plus merupakan keluarga yang dapat memberikan sumbangan yang berkelanjutan dan memenuhi kebutuhan sosial dan psikologis dasar. Keluarga yang dianggap memenuhi indikator Keluarga Sejahtera III Plus adalah yang dapat memenuhi indikator dari keluarga prasejahtera sampai sejahtera III.<sup>12</sup>

### 3. Indikator Kesejahteraan dalam Islam

Indikator kesejahteraan berdasarkan pendapat Imam Al-Ghazali bahwa, meskipun kebutuhan lain juga penting, kemampuan seseorang untuk makan, minum, berpakaian, dan tidur adalah kunci kesejahteraan mereka.<sup>13</sup> Kesejahteraan berdasarkan *maqashid al-syariah* sebagai berikut :

#### 1. Memelihara Agama (*Ad Dien*)

*Maqasid al-syariah*, atau ketaatan terhadap rukun Islam seperti shalat, zakat, puasa, dan haji mengukur tingkat ketaatan seseorang terhadap agamanya. Bukti lain dapat ditemukan dalam pemenuhan rukun iman,

---

<sup>12</sup> Piuskosmas Fau Mei Yati Simatupang, *Asuhan Keperawatan Keluarga : Teori dan Aplikasi* (Penerbit : P4i, 2023), hlm 16-17.

<sup>13</sup> Adiwarmarman Azwar Karim, *Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam*, Ed. 3 (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2016), hlm 61.

yang meliputi percaya kepada Allah, para rasul-Nya, kitab-kitab-Nya, hari akhir, serta qadha dan qadar-Nya.

## 2. Memelihara Jiwa (*An-Nafs*)

Memelihara jiwa berarti memastikan hak hidup setiap orang terpenuhi sesuai dengan peraturan yang berlaku, menjaga hak tersebut dengan penuh kehormatan dan tidak boleh dirusak. Memelihara jiwa melibatkan perlindungan diri dari bahaya yang mungkin timbul dari golongan tertentu serta menjaga kesehatan fisik, termasuk kebutuhan dasar seperti sandang, pangan, papan, kesehatan, dan fasilitas umum lainnya.

## 3. Memelihara Akal (*Aql*)

Memelihara Akal ada tiga tingkatan. Konsumsi alkohol dilarang pada tingkat *dhauriyah*. Perintah untuk menuntut ilmu dengan belajar, pendidikan, dan pengembangan pengetahuan dikenal sebagai tingkat *hajiyah*. Tingkatan terakhir dari *tahsiniyah* adalah menahan diri dari percakapan yang tidak berguna, seperti gosip.

## 4. Memelihara Keturunan (*An Nasl*)

Menurut Islam, kesejahteraan mengacu pada pemenuhan kebutuhan keluarga. Seseorang dianggap sejahtera jika kebutuhan keluarganya terpenuhi dan ia mampu menafkahi anak-anaknya. Islam adalah *rahmatan lil alamin*, oleh karena itu Islam sangat berhati-hati dalam menerapkan teori yang dipaparkan di atas.

## 5. Memelihara Harta (*Al Maal*)

Memelihara harta adalah salah satu tujuan Syariah seperti menjaga harta, serta memastikan bahwa harta tersebut terus ada dan bahwa orang-orang tidak bertindak sebagai penghalang antara mereka dan harta mereka. Memelihara harta hanya ada tiga persyaratan yaitu, harta harus diperoleh dengan cara yang baik, halal, dan adil, harta harus digunakan untuk tujuan-tujuan yang halal, dan harta harus diusahakan dengan cara yang adil.

### C. Mustahik

#### 1. Pengertian

2. *Mustahik* zakat adalah orang-orang yang berhak menerima harta zakat.

Distribusi adalah proses penyaluran produk, jasa, dan barang lainnya ke sejumlah besar individu atau lokasi. Secara umum, tujuan zakat adalah untuk mencapai keadilan sosial ekonomi. Zakat adalah metode langsung untuk mentransfer jumlah tertentu dari *muzakki* atau mereka yang menawarkan zakat kepada mustahik atau mereka yang memenuhi syarat untuk menerimanya. Zakat didasarkan pada gagasan untuk memberikan manfaat, zakat juga merupakan salah satu fitur atau komponen ekonomi

#### Islam.<sup>14</sup> **Orang-orang yang berhak menerima Zakat**

##### 1. Fakir

Golongan fakir adalah orang yang tidak memiliki harta dan tidak memiliki pekerjaan atau usaha yang tetap untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, serta tidak ada pihak lain yang menanggung bebannya.

---

<sup>14</sup> Selamat Riadi, *Strategi Distribusi Zakat dan Pemberdayaan Mustahik: Studi Kasus Baznas Kota Mataram*, *JURNAL SCHEMATA Pascasarjana UIN Mataram* 9, no. 1 (30 Juni 2020): hlm, 125–36, <https://doi.org/10.20414/schemata.v9i1.2264>.

Contoh bantuan yang bisa diberikan meliputi penyediaan bahan pokok, pemberian zakat fitrah pada hari raya Idul Fitri, serta bantuan langsung lainnya seperti zakat konsumtif.

## 2. Miskin

Orang miskin dan orang faqir sekilas tampak sama, namun masalah harga diri yang dimiliki oleh orang miskin membedakan keduanya (*Ifah*). Demi harga dirinya, orang faqir tidak mau meminta, sementara orang miskin tidak malu meminta-minta kepada orang lain.

## 3. Amil

Amil bertanggung jawab untuk mengawasi seluruh proses pelaksanaan zakat, termasuk pengumpulan, pemeliharaan, dan pendistribusiannya kepada yang berhak.

## 4. Muallaf

Muallaf adalah seseorang yang baru memeluk agama Islam atau individu yang hatinya dilunakkan di antara mereka yang belum menjadi Muslim. Muallaf juga bisa merupakan orang-orang yang perlu ditarik simpatinya terhadap Islam, diharapkan dapat membela umat Islam, atau yang perlu diamankan agar tidak melakukan kejahatan terhadap umat Islam.

## 5. Hamba Sahaya

Hamba sahaya merupakan orang yang saat ini hidupnya belum merdeka atau menjadi budak yang dijumpai pada zaman nabi dahulu, namun di zaman sekarang budak sudah tidak ada lagi, maka bagian hamba sahaya dapat digunakan untuk:

- a. Menebus umat Islam yang ditawan oleh musuh.
- b. Dana untuk kepentingan umat Islam internasional.
- c. Pembyaran denda (*diyat*) untuk terpidana muslim yang telah bertobat dan tidak mampu membayar *diyat*.
- d. Pembebasan pekerja yang diperlakukan atau dieksploitasi secara tidak manusiawi.
- e. Dana untuk membantu umat islam mengurangi ketergantungan terhadap non-Muslim.

#### 6. *Gharim*

*Gharim* adalah mereka yang terlilit hutang, mereka yang telah mengajukan kebangkrutan dan tidak mampu membayar tagihan mereka, dan mereka yang meninggal dunia dengan hutang yang belum terbayar karena tidak mendapatkan warisan yang cukup.

#### 7. *Fii Sabilillah*

*Fii Sabilillah* adalah zakat yang diperuntukkan bagi orang-orang yang berperang untuk melindungi agama Allah namun, di zaman modern ini konteks *fisabilillah* mencakup lebih dari sekadar berperang. *Fisabilillah* juga mencakup usaha-usaha yang lebih umum seperti dakwah dan penggunaan segala cara yang tersedia untuk menegakkan agama Allah SWT.

#### 8. *Ibnu Sabil*

*Ibnu Sabil* merupakan seorang musafir (orang yang bepergian di daerah asing) yang kehabisan bekal. Orang tersebut diberi harta zakat

sebesar apa yang mencukupi dirinya sampai kembali ke daerah asalnya.

## **D. Lembaga Zakat**

### **1. Pengerian LAZ**

Lembaga zakat adalah organisasi yang menaungi sumber dana zakat yang diperoleh dari muzakki, yang meliputi individu maupun badan usaha ketika zakat diterima sesuai dengan ketentuan Islam yang berlaku atau amil yang menerima zakat, mencakup zakat harta benda, zakat fitrah, maupun zakat dalam bentuk lainnya (infaq dan shadaqah). Lembaga zakat adalah salah satu lembaga yang bertugas menerima zakat, atau menyalurkan dana dari pihak yang memiliki kelebihan dana (muzakki) kepada pihak yang membutuhkan dana (mustahik). Lembaga zakat di Indonesia telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999 tentang pengelolaan zakat :

1. Badan Amil Zakat (BAZ) adalah lembaga swadaya masyarakat yang bertugas mengelola penerimaan, pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan ZIS (Zakat, infaq, dan shodaqoh) secara efisien dan efektif.
2. Lembaga Amil Zakat (LAZ) adalah organisasi pengelola zakat yang sepenuhnya terdiri dari masyarakat muslim yang bergerak di bidang dakwah, pendidikan, dan sosial yang disahkan, didukung, dan dilindungi oleh negara.

Undang-Undang No. 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat menggantikan Undang-Undang No. 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan

Zakat karena dianggap sudah tidak memenuhi kebutuhan hukum yang berkembang di masyarakat. Undang-undang ini mengatur perencanaan, pendistribusian, penggunaan, serta pengumpulan dan pendayagunaan zakat. Sebagai bagian dari regulasi ini, dibentuklah Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) yang terdiri dari BAZNAS Pusat di Ibu Kota Negara, BAZNAS Provinsi, dan BAZNAS Kabupaten/Kota untuk mencapai tujuan pengelolaan zakat. BAZNAS adalah lembaga pemerintah non-struktural yang bersifat otonom dan bertanggung jawab kepada Presiden melalui Menteri. BAZNAS memiliki wewenang untuk mengelola zakat di tingkat nasional, sedangkan lembaga Amil Zakat (LAZ) yang diinisiasi oleh pihak swasta perlu mendapatkan izin dari pejabat berwenang seperti Menteri atau pejabat yang ditunjuk oleh Menteri, serta wajib melaporkan kegiatan mereka secara berkala. Selain zakat, BAZNAS dan LAZ juga menerima infak, sedekah, dan dana sosial keagamaan lainnya, yang pendistribusiannya dilakukan sesuai dengan syariat Islam dan tujuan yang diikrarkan oleh pemberi, serta dicatat secara terpisah dalam pembukuan.<sup>15</sup>

## **2. Fungsi, Tujuan dan Manfaat Lembaga Zakat**

Fungsi lembaga zakat adalah mendistribusikan dana zakat, infak, dan sedekah (ZIS) yang diterima atau dikumpulkan dari *muzakki*. Dana tersebut kemudian disalurkan kepada orang-orang yang berhak menerima, yaitu *mustahik*.

Tujuan lembaga zakat :

---

<sup>15</sup> Holil, *Lembaga Zakat dan Peranan dalam Ekuitas Ekonomi Sosial dan Distribusi*, *AL-INFAQ: Jurnal Ekonomi Islam* 10, no 1 (2019), hlm, 14-15.



- a. Memberikan layanan yang lebih baik untuk tujuan menunaikan zakat.
- b. Meningkatkan peran dan fungsi organisasi keagamaan dalam mewujudkan keadilan sosial dan kesejahteraan masyarakat.
- c. Meningkatkan hasil daya guna dan daya guna zakat.

Manfaat lembaga zakat :

1. Memudahkan pembayaran zakat bagi para muzakki.
2. Mempererat tali persaudaraan di antar umat islam.
3. Menghindarkan diri dari pola pikir yang angkuh.<sup>16</sup>

---

<sup>16</sup> Haniah Lubis, *Lembaga Keuangan Syariah* (Pebnerbit NEM, 2021), hlm 120-121.